

DAFTAR PUSTAKA

A. BUKU

Ali, Achmad. 2009. *Menguak Teori Hukum (Legal Theory) dan Teori Peradilan*, Jakarta: Kencana.

Ali, Zainuddin. 2009. *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Sinar Grafika.

Arief, Barda Nawawi. 2011. *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*, Jakarta: Kencana.

Arifin, Evi Nurvidya. 2016. *Perlindungan Hukum terhadap Saksi Anak dalam Sistem Peradilan Pidana Indoensia*, Jurnal Hukum Ius Quia Iustum, Vol. 23 No. 2.

Arifuddin, Qadriani, dkk. 2025. *Metodologi Penelitian Hukum*, Jambi: PT. Sonpedia Publishing Indonesia.

Atmasasmita, Romli. 2010. *Sistem Peradilan Pidana: Perspektif Eksistensialisme dan Abolisionisme*, Bandung: Bina Cipta.

Gosita, Arif. 2004. *Masalah Perlindungan Anak*. Jakarta: Akademika Pressindo.

Huraerah, Abu. 2012. *Kekerasan Terhadap Anak*. Bandung: Refika Aditama.

Krisna, Liza Agnesta. 2018. *Hukum Perlindungan Anak*. Yogyakarta. CV Budi Utama.

Mohammad Taufik Makarao, dkk. 2013. *Hukum Perlindungan Anak dan Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga*, Ctk. Pertama. Jakarta: PT Asdi Mahasatya.

Muladi. 2013. *Peradilan Anak di Indonesia: Suatu Pengantar*, Semarang: Undip Press.

Prakoso, Abintoro. 2016. *Hukum Perlindungan Anak*. Yogyakarta. LaksBang PRESSindo.

- Peter Mahmud Marzuki. 2017. *Penelitian Hukum Edisi Revisi*. Jakarta: Prenada Media Group.
- Ramadhani, Rahmat. 2021. *Hukum Acara Peradilan Anak*, Medan: UMSU Press
- Solehuddin, Muhammad. 2019. *Sistem Sanksi dalam Hukum Pidana: Ide di Balik Gagasan Pemidanaan yang Adil*, Jakarta: RajaGrafindo Persada.
- Soekanto, Soerjono. 2010. *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta: UI Press.
- Soerjono Soekanto & Sri Mamudji. 2015. *Penelitian Hukum Normatif*, Jakarta: Rajawali Pers Edisi ke 13.
- Soetodjo, Wagianti. 2010. *Hukum Pidana Anak*, Bandung: Refika Aditama.
- Sugiyono. 2015. *Metode Penelitian Pendidikan: Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D.*, Bandung: Penerbit Alfabeta. Cetakan XX.
- Sukardi. 2020. *Restorative Justice dalam Penegakan Hukum Pidana Indonesia*, Depok: PT Raja Grafindo Persada
- Rahardjo, Satjipto. 2006. *Membedah Hukum Progresif*, Jakarta: Kompas.

B. PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5332).
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 297, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5606).

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5882).

Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasysarakatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6811).

Konvensi Hak-Hak Anak.

Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pembinaan dan Pembimbingan Warga Binaan Pemasysarakatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3842).

Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2015 tentang Pedoman Pelaksanaan Diversi dan Penanganan Anak yang Belum Berusia 12 Tahun (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 194, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5732).

Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2022 tentang Bentuk dan Tata cara Pelaksanaan Pidana dan Tindakan Terhadap Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 236, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6839).

Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 18 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Pembinaan Khusus Anak (Jakarta: Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia).

Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 31 Tahun 2016 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan Terpadu Sistem Peradilan Pidana Anak Bagi Aparat Penegak Hukum dan Instansi Terkait (Jakarta: Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia).

Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 35 Tahun 2018 tentang Revitalisasi Penyelenggaraan Pemasyarakatan (Jakarta: Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia).

C. JURNAL DAN LAIN-LAIN

Kurniawan, Fadhilla. 2021. "*Kendala Eksekutor Dalam Pelaksanaan Eksekusi Hukuman Pelatihan Kerja Dalam Perkara Pidana Anak (Studi: Kejaksaaan Negeri Ngawi)*". Jurnal Verstek Vol. 9 No. 2.

M. Bilal Baihaqi. 2024. "*Analisis Yuridis Sanksi Pelatihan Kerja Sebagai Pengganti Denda Terhadap Anak Yang Berkonflik Dengan Hukum Dalam Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak*". Diponegoro Law Journal. Vol. 13 No.1.

Muhammad Syahrur, *Pengantar Metodologi Penelitian Hukum: Kajian Penelitian Normatif, Empiris, Penulisan Proposal, Laporan Skripsi dan Tesis*, Riau: DOTPLUS Publisher, (2022).

Mulyana W. Kusumah, *Keadilan Restoratif dan Revitalisasi Lembaga Adat dalam Penyelesaian Perkara Anak*, Jakarta: Pusat Studi Hukum & Kebijakan Indonesia, 2018

Reisasari, Mirta Diatri. 2020. "*Penjatuhan Sanksi Pidana Pelatihan Kerja Terhadap Anak yang Berhadapan Dengan Hukum*". Indonesian Journal of Criminal Law and Criminology (IJCLC). Vol. 1 No. 1.

Rahayu, Ani., Pebriani, Erin., Nopriani, Hilda., dkk, *Dampak Era Globalisasi terhadap Karakteristik Anak*, Jurnal Nautical (2023).

- Setyawan, D.G., & Muhammad, A., *Peran Kelompok Masyarakat Peduli Pemasyarakatan (Pokmas Lipas) dalam proses pembimbingan klien pemasyarakatan*, Innovative: Jurnal Of Social Science Research, (2021).
- Sofyan, Andi Muhammad, *Peranan Balai Pemasyarakatan dalam Sistem Peradilan Pidana Anak*, Makassar: Sah Media, 2019.
- Siti Malikhatun Badriyah, *Efektivitas Pembimbingan Balai Pemasyarakatan dalam Pelaksanaan Pidana Pelatihan Kerja bagi Anak*, Jurnal Hukum Khaira Ummah, Vol. 15, No.2, 2020.
- Tresilia Dwitamara, *Pengaturan dan Implementasi Mengenai Hak Anak yang Berkonflik dengan Hukum di Indonesia*, Prespektif: Kajian Masalah Hukum dan Pembangunan (2025).